

PENGARUH ALOKASI ANGGARAN PEMERINTAH TERHADAP AKTIVITAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KOTA JAYAPURA

Normayunita¹

Julius Ary Mollet²
jam_mollet@yahoo.com

Antonia Klara Bonay³
clathitie@yahoo.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa banyak alokasi anggaran yang tersalurkan ke kaum perempuan dari program-program kegiatan yang dibuat oleh Badan Pemberdayaan Perempuan yang ada di Kota Jayapura. Penelitian dilakukan dengan metode kasus dengan mengkombinasikan berbagai cara dalam pengambilan data untuk membahas topik diatas secara deskriptif kualitatif, dengan analisis data menggunakan analisis SWOT yaitu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu obyek penelitian.

Kata Kunci: *Alokasi Anggaran, Aktivitas, Pemberdayaan Perempuan*

PENDAHULUAN

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakikatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga sasaran pembangunan yang menciptakan kondisi kehidupan masyarakat akan lebih baik, dalam hal ini pemerintah dituntut dapat memberikan pelayanan kepada element masyarakat. Pembangunan daerah juga berarti memampukan suatu daerah untuk mengelola sumber daya ekonominya secara berdaya guna berhasil untuk kemajuan daerah.

Pemberdayaan Perempuan sudah menjadi isu bangsa sejak lama, pembangunan akan berhasil ketika adanya peran dari semua element masyarakat. Dan pada pelaksanaanya peran perempuan belum dioptimalkan maka memberdayakan perempuan telah menjadi agenda bangsa. Adanya partisipasi aktif perempuan akan mempercepat tercapainya pembangunan. Kenyataannya perempuan belum optimal dalam beberapa aspek pembangunan, hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas hidup dan peran

¹ Alumni Program S1 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih

² Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih

³ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih

perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Seperti peluang dan kesempatan yang terbatas dalam mengakses sumberdaya, tingkat kesehatan dan pendidikan yang masih rendah.

Dan Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang mengatur tentang otonomi daerah yaitu undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonomi terkhususnya propinsi Papua dapat membuka peluang bagi penyusunan kebijakan publik ditingkat lokal untuk memecahkan persoalan-persoalan yang muncul dimasing-masing daerah, termasuk persoalan-persoalan kelompok perempuan di Papua itu sendiri. Dalam mengambil kebijakan-kebijakan demi kepentingan publik tidak terlepas dari peranan element masyarakat yang disebut Stakeholders.

Stakeholders adalah kelompok masyarakat yang memiliki keterkaitan kepentingan dengan sebuah kebijakan. Untuk itu diperlukan partisipatif dari seluruh masyarakat baik itu laki-laki maupun perempuan, partisipasi ini dapat dilakukan secara langsung maupun dengan sistem perwakilan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (a) berapa besar alokasi anggaran pemerintah yang tersalurkan terhadap aktivitas pemberdayaan perempuan yang ada di Kota Jayapura, (b) bagaimana dampak dari alokasi anggaran pemerintah terhadap aktivitas pemberdayaan perempuan yang ada di Kota Jayapura.

Untuk memperjelas permasalahan yang dikemukakan perlu adanya pembatasan masalah dari topik yang akan dikaji, maka penulis membatasi permasalahan alokasi anggaran pemerintah dalam pemberdayaan perempuan yakni dana alokasi anggaran pemerintah Kota Jayapura yang diutamakan ke perempuan yang terdiri dari pada 3 sektor yaitu, pada sektor kesehatan, sektor pendidikan dan yang utama pada sektor ekonomi kerakyatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah : (a) untuk mengetahui berapa alokasi anggaran pemerintah yang terserap oleh kelompok perempuan di Kota Jayapura, (b) untuk mengetahui dampak dari alokasi anggaran pemerintah terhadap aktivitas pemberdayaan perempuan di kota Jayapura. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah : (a) sebagai bahan pengkajian pada permasalahan gender terkhusus pemberdayaan perempuan, (b) sebagai masukan kepada pihak pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih bijak dan Sebagai data atau informasih bagi masyarakat khususnya perempuan agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Anggaran

Penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan suatu anggaran yang berisi pernyataan dalam bentuk satuan uang yang merupakan refleksi dari aktivitas dan target kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu. Penganggaran pada dasarnya merupakan proses penentuan jumlah alokasi sumber-sumber ekonomi untuk setiap program dan aktivitas dalam bentuk satuan uang. Selain itu anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan dan jaminan kesinambungan pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran diperlukan karena adanya ketentuan dan kerugian masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang sedangkan sumber daya yang ada terbatas.

Fungsi Anggaran

- a. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan :
 - Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan sesuai visi dan misi yang ditetapkan.
 - Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.
 - Mengalokasikan sumber – sumber ekonomi pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
 - Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
- b. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian :
 - Mengendalikan efisiensi pengeluaran
 - Membatasi kekuasaan atau kewenangan Pemerintah Daerah.
 - Mencegah adanya salah sasaran dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas.
 - Memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah.
- c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberian fasilitas, dorongan, dan koordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- d. Anggaran sebagai politik digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut.
- e. Anggaran sebagai alat koordinasi antar unit kerja dalam organisasi Pemerintah Daerah yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran.
- f. Anggaran sebagai alat evaluasi kerja.

- g. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajemen Pemerintah Daerah agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target kinerja.
- h. Anggaran digunakan sebagai alat untuk menciptakan ruang publik yakni proses penyusunan anggaran harus melibatkan seluas mungkin masyarakat.

Peran Anggaran Pada Sektor Publik

- a. Anggaran merupakan alat terpenting bagi Pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas dan pilihan (*choice*).
- c. diperlukan untuk meyakinkan bahwa Pemerintah telah bertanggung jawab terhadap masyarakat.

2. Konsep Tentang Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan adalah merupakan cara praktis dan produktif untuk mendapatkan yang terbaik dari dalam diri kita sendiri dan organisasi (Aileen Mitchell Stewart, 1988 : 22-23).

Sedangkan menurut Mulyadi dan Jhony Setyawan (1999 : 1003) pemberdayaan berarti memampukan (*to enable*), memberi kesempatan (*to allow*) atau mengizinkan, yang dapat diartikan baik melalui inisiatif sendiri atau dipicu oleh orang lain.

Pemberdayaan merupakan proses peningkatan kapasitas seseorang atau kelompok dalam menentukan pilihan guna melakukan suatu aksi atau output yang diinginkan. Pemberdayaan merupakan kombinasi antara dua faktor yang saling terkait yakni agen (*agency*) dan struktur peluang. *Agency* dimaksud adalah kemampuan seseorang dalam menentukan pilihan yang berarti baginya. Sedangkan struktur peluang adalah berbagai aspek yang membuat seseorang dapat berbuat sesuatu karena kemampuannya untuk memilih. Dengan demikian, pemberdayaan dapat diartikan sebagai keadaan dalam situasi ketika terdapat keseimbangan relasi kekuasaan, maka seseorang yang memiliki kapasitas yang memadai mampu melakukan pilihan-pilihan yang efektif serta dapat memperoleh keuntungan dari berbagai upaya/proyek yang berusaha menekan ketimpangan.

3. Teori-Teori Partisipasi Perempuan

Perempuan dalam Pembangunan (Women and Development)

Menurut kaum Feminist-Marxist bahwa pada hakikatnya Perempuan menjadi bagian dari Pembangunan Nasional. Perempuan selalu menjadi pelaku penting dalam masyarakat baik kerja yang dilakukan berada didalam rumah maupun diluar rumah yang pada hakikatnya tidak egaliter. Namun dalam menjalankan perannya Perempuan selalu dalam hubungan sub-ordinasi terhadap laki-laki. Keberhasilan Perempuan cenderung diukur dengan indikator-indikator seperti Partisipasi angkatan kerja, akses kepada pendidikan, kondisi kesehatan serta akses pada sumber daya lainnya.

Gender dan Pembangunan (Gender and Development)

Keberhasilan konsep gender dalam pembangunan diukur dari efisiensi pemanfaatan sumber, tabungan, investasi dan pertumbuhan, pembentukan modal, pemberantasan kemiskinan dipandang bersifat “gender sensitive”, dimana seberapa jauh pembangunan telah menimbulkan dampak terhadap partisipasi baik kuantitatif maupun kualitatif, perempuan terhadap laki-laki ; seberapa jauh pembangunan membuka atau membatasi akses terhadap sumber dan manfaat serta penguasaan terhadap sumber dan manfaat perempuan terhadap laki-laki dan seberapa jauh pembangunan merugikan atau menguntungkan perempuan terhadap laki-laki.

4. Teori Pengarusutamaan Gender

Perbedaan gender telah melahirkan ketidak-adilan dimana ketidak-adilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotype, kekerasan dan beban kerja ganda (Mansour Fakih, 1999:147:150). Dari akar permasalahan ketidak-adilan gender tersebut telah memunculkan konsep PUG (Pengarusutamaan Gender). Berdasarkan pemaparan Drs. Dermawan yang berjudul “PUG dan Analisis Gender” bahwa :“PUG merupakan strategi untuk menjadikan kepentingan laki-laki dan perempuan masuk dalam bagian integral dalam siklus rancangan pembangunan mulai dari perencanaan sampai penganggarannya sehingga laki-laki dan perempuan mendapatkan yang sama.”

Ada tiga prinsip utama PUG yaitu : (1) menempatkan individu sebagai manusia seutuhnya dimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, (2) prinsip demokrasi dimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, (3) prinsip fairness, justice dan equity (Pemerataan, Penegakan Hukum dan Kesetaraan)

5. Ideologi Gender

Gender sebagai perbedaan perempuan dan laki-laki berdasarkan sosial yang tercermin dalam kehidupan yang berawal dari keluarga. Hal ini juga menunjukkan adanya social expectation (ekspektasi sosial) yang berbeda terhadap anak perempuan dan anak laki-laki (Morris 1987). Di Indonesia terdapat 3 konsep pemahaman gender, meliputi :

Ketidakadilan dan diskriminasi gender

Ketidak-adilan dan deskriminasi gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur social dimana baik perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari system tersebut. Bentuk ketidak-adilan ini antara lain :

- Marjinalisasi perempuan
- Sub ordinasi
- Pandangan stereotype
- Kekerasan

- Beban kerja

Kesetaraan dan keadilan gender

Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana posisi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional, bukan berdasarkan perhitungan secara matematis dan tidak bersifat universal.

Penerapan pengarusutamaan gender

Penerapan pengarusutamaan gender (PUG) oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan di Indonesia menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Pluralistis
- Bukan pendekatan konflik
- Melalui proses sosialisasi dan advokasi
- Menjunjung nilai HAM dan Demokrasi

Pendekatan pembangunan dan upaya mengurangi ketimpangan sosial melalui pemberdayaan sangat berhubungan dengan apa yang disebut pendekatan pembangunan berbasis hak. Konsep tersebut didasari oleh pemikiran bahwa setiap orang memiliki berbagai hak yang mendasar yang mana setiap Negara atau Daerah wajib untuk memajukan, meningkatkan, dan melindungi hak-hak warga negaranya.

6. Indeks Ketimpangan Gender

UNDP, sejak tahun 2010 telah mengukur ketimpangan/ketidaksetaraan gender Inequality Index (GII) atau Indeks ketimpangan gender. Indeks ini menunjukkan adanya kehilangan dalam pembangunan manusia yang diakibatkan adanya kesenjangan gender. Kesenjangan yang terjadi diakibatkan dari adanya deskriminasi dari berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Terjadinya diskriminasi pada salah satu gender dapat diukur dengan GII. Nilai GII berkisar dari 0 hingga 1.

7. Program Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi Melalui Home Industri

Dalam hal peningkatan ekonomi perempuan di Indonesia khususnya di Papua, perempuan memiliki keterbatasan dalam menjalankan aktivitasnya, keterbatasan tersebut seperti rendahnya pendidikan, keterampilan, kesempatan kerja, dan juga hamabatan ideologi perempuan yang terkait rumah tangga. Selain itu perempuan juga dihadapkan pada kendala tertentu yang dikenal dengan istilah “*triple burden of women*”, yaitu perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial secara bersamaan di masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kesempatan perempuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada menjadi sangat terbatas.

Oleh karena itu program pemberdayaan pemberdayaan bagi perempuan dibidang ekonomi sangat diperlukan karena pada dasarnya perempuan memiliki potensi yang luar biasa dalam perekonomian terutama dalam pengaturan ekonomi rumah tangga.

Dibidang ekonomi, pemberdayaan perempuan lebih banyak ditekankan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha, khususnya dalam hal ini adalah usaha home industry. Ada lima langkah penting yang perlu diperhatikan dalam upaya pengembangan kemampuan berwirausaha bagi perempuan. Menurut IMF yang dikutip oleh (Herri, dkk .2009:5) yaitu :

- Membantu dan mendorong kaum perempuan untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan serta kompetensi diri mereka, melalui berbagai program pelatihan,
- Membantu kaum perempuan dalam strategi usaha dan pemasaran produk,
- Memberikan pemahaman terhadap regulasi dan peraturan pemerintah terkait dengan legislative dunia usaha,
- Membuat Usaha Mikro/Jaringan Usaha Mikro Perempuan/Forum Pelatihan Usaha

Inti dari semua kebijakan tersebut adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Peningkatan Peran, Kedudukan dan Kualitas Perempuan serta Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender yang terdiri dari :

- Alokasi anggaran gender dalam sektor pendidikan
- Alokasi anggaran gender dalam sektor kesehatan
- Alokasi anggaran dalam sektor pembangunan (ekonomi kerakyatan)

TINJAUAN EMPIRIS

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini yaitu :

Penelitian oleh Emma Nordiana pada tahun 2008 dengan judul penelitian “Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Kendal”. Penelitian ini sama-sama membahas tentang Pemberdayaan perempuan beserta aktivitas-aktivitas melalui 3 sektor peningkatan kesehatan, dan memperhatikan persoalan gender dalam alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan sektor pembangunan

Penelitian oleh Putri Astini pada tahun 2009 dengan judul penelitian “Peran PKK dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui aktivitas kegiatan home industry di Dusun Kaliwaru, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini sama-sama membahas tentang pemberdayaan perempuan beserta aktivitas-aktivitasnya, dalam penelitian ini pemberdayaan yang dilakukan untuk perempuan sudah cukup maksimal. Pemberdayaan dilakukan melalui aktivitas kegiatan program kesehatan, kegiatan ekonomi membuat produk, latihan-latihan dalam penyuluhan.

Data Susenas 2010 menunjukkan 13,9 persen rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan. Banyak pandangan mengenai perempuan bahwa perempuan hanyalah pendamping hidup, bersifat lemah, selalu memakai perasaan, berfikir sempit dan lain sebagainya. Pandangan tersebut telah ada sejak lama dalam lingkungan masyarakat. sudah juga membudaya bahwa tugas seorang perempuan adalah memasak, berdandan dan melahirkan anak. Tidak heran kedudukan perempuan terkadang menjadi nomor dua dan tidak sedikit orang yang merendahkan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindakan yang merendahkan perempuan.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Jayapura dengan pertimbangan bahwa Kota Jayapura merupakan wilayah yang strategis untuk mengetahui aktivitas-aktivitas para perempuan diberbagai sektor, diantaranya yaitu disektor, pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor pertumbuhan ekonomi dalam memperoleh data penelitian.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah merupakan jenis data kualitatif deskriptif, dan menurut sumbernya adalah data sekunder. Data berupa kebijakan pemerintah melalui APBD dan tingkat partisipasi perempuan yang diperoleh dari kantor Pemberdayaan Perempuan Kota Jayapura terkait dalam meningkatkan peranan dari kelompok perempuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara Mendalam (indepth interview)

Menurut Mile dan Huberman, wawancara adalah kegiatan yang dilakukan pada saat konteks yang dianggap tepat guna dalam mendapatkan data yang mempunyai kedalaman dan dapat dilakukan berkali-kali secara frekuentatif sesuai dengan keperluan penelitian tentang kejelasan masalah penelitian yang difokuskannya. Teknik ini dimaksudkan agar peneliti mampu mengeksplorasi data dari informan yang bersifat nilai, makna, dan pemahaman yang tidak mungkin dilakukan melalui teknik survey.

Observasi (observation)

Observasi atau pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini digunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis ini terdiri dari tiga alur yaitu ;

- Reduksi data, yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan tempat penelitian
- penyajian data dilakukan dengan menggunakan bentuk teks naratif,

- penarikan kesimpulan data yang diperoleh dilakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam
- Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan, data yang dikumpulkan melalui data kepustakaan mengenai alokasi anggaran terhadap pemberdayaan perempuan, dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelusuran literatur-literatur dimana data-data yang diperoleh dari berbagai literature untuk memperoleh informasi atau data yang berkaitan dengan pokok penelitian, seperti buletin-buletin, jurnal-jurnal, berbagai blog, serta bahan bacaan lainnya yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan perempuan.

Dengan demikian metode penelitian yang digunakan tidak tunggal, melainkan gabungan antara berbagai metode pengumpulan data. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi yang lebih, sesuai dengan tujuan penelitian.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis perolehan data adalah secara deskriptif yakni melalui *interview* (wawancara) berdasarkan atas pedoman wawancara mendalam (*indepth interview*) serta data pustaka yang terkait dengan masalah yang diteliti. Kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT . Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu obyek. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi dari penelitian. Manfaat dari analisis SWOT yaitu :

- Untuk melakukan perencanaan dalam upaya mengantisipasi masa depan dengan melakukan pengkajian berdasarkan pengalaman masa lampau, ditopang sumber daya dan kemampuan yang dimiliki saat ini yang akan diproyeksikan ke masa depan
- Untuk menganalisis kesempatan/peluang dan kekuatan dalam membuat rencana jangka panjang
- Untuk mengatasi ancaman dan kelemahan yang mempunyai kecenderungan menghasilkan rencana jangka pendek, yaitu rencana untuk perbaikan.
- Untuk mengidentifikasi Faktor eksternal (O dan S) dan Faktor Internal (S dan W)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari beberapa program kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kota Jayapura cukup membantu dan dapat memberikan suatu dampak perubahan dalam meningkatkan pengetahuan secara umum melalui program kegiatan khususnya kesehatan, pendidikan, dan pembangunan/ekonomi kerakyatan.

1. Besarnya Alokasi Anggaran Pemerintah Yang Tersalurkan Terhadap Aktivitas Pemberdayaan Perempuan Yang Ada Di Kota Jayapura

Salah satu pengalokasian untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura, dapat dilihat di tabel dibawah ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2012

No	Program Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran
1	Program Keluarga Berencana	DAU	1.425.851.000,00
2	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	OTSUS	150.000.000,00
3	Program kegiatan reproduksi remaja	DAU	100.000.000,00
4	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	OTSUS	472.280.000,00
5	Program pelayanan kontrasepsi	DAU	200.000.000,00
6	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	DAU	790.000.000,00
		Sumber Dana	2.234.864.000,00

Sumber: BPPKB Kota Jayapura, 2013

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2012 terdapat 6 program kegiatan yang dijalankan oleh Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang terdiri dari program keluarga berencana dengan sumber dana yaitu DAU dengan anggaran sebesar Rp. 1.425.851.000,00, program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan sumber dana yaitu OTSUS dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dengan sumber dana yang digunakan berasal dari OTSUS dengan anggaran sebesar Rp. 472.280.000. Program pelayanan kontrasepsi dengan sumber dana dari DAU dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000. danProgram peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan sumber dana dari DAU dengan anggaran sebesar 790.000.000,00. Jadi total jumlah dana yang digunakan pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp.2.234.864.000,00.

Tabel 2. Rekapitulasi Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2013

No	Program Kegiatan	Sumber Dana	Jumlah
1	Program keluarga berencana (KB)	DAK dan DAU	1.030.150.000,00
2	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	OTSUS	110.000.000,00
3	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	OTSUS	50.000.000,00
4	Program pelayanan kontrasepsi	OTSUS	150.000.000,00
5	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	OTSUS	200.000.000,00
6	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	DAU	776.000.000,00

No	Program Kegiatan	Sumber Dana	Jumlah
	dalam pembangunan	OTSUS	
7	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	OTSUS	124.850.000,00
8	Program pengembangan pusat pelayanan dan informasih dan konseling KKR	OTSUS	150.000.000,00
	Total Jumlah		2.591.000.000,00

Sumber: BPPKB Kota Jayapura, 2014

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2013 program kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana bertambah menjadi 8 program kegiatan dari tahun sebelumnya. Program-program yang dijalankan dengan perincian sebagai berikut, program kegiatan keluarga berencana dengan sumber dana yang berasal dari DAK dan DAU dengan anggaran sebesar Rp. 1.030.150.000,00. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan sumber dana OTSUS dengan anggaran sebesar Rp. 110.000.000,00. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, dengan sumber dana dari OTSUS sebesar Rp .50.000.000,00. Program pelayanan kontrasepsi dengan sumber dana yang berasal dari OTSUS sebesar Rp. 150.000.000,00. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dengan sumber dana yang berasal dari OTSUS sebesar Rp. 200.000.000,00. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan sumber dana yang berasal dari DAU dan OTSUS sebesar Rp. 776.000.000,00. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, dengan sumber dana berasal dari OTSUS dengan anggaran sebesar Rp. 124.850.000,00. Program pengembangan pusat pelayanan dan informasih dan konseling KKR dengan sumber dana yang berasal dari OTSUS sebesar Rp. 150.000.000,00. Jadi jumlah anggaran yang yang digunakan di tahun 2013 untuk 8 program kegiatan sebesar Rp. 2.591.000.000,00.

Tabel 3. Rekapitulasi Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2014

No	Program Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran
1	Program Keluarga Berencana	DAU	1.425.851.000,00
2	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	OTSUS	150.000.000,00
3	Program kegiatan reproduksi remaja	DAU	100.000.000,00
4	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	OTSUS	472.280.000,00
5	Program pelayanan kontrasepsi	DAU	200.000.000,00
6	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	DAU	790.000.000,00
		Sumber Dana	3.138.131.000,00

Sumber: BPPKB Kota Jayapura, 2014

Berbeda dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2013 terdapat 8 program kegiatan yang disusun dan dijalankan oleh Pemberdaayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Pada tahun 2014 program kegiatan yang di susun oleh Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan kegiatannya menjadi 6 kegiatan, diantaranya yaitu ; program Keluarga Berencana sumber dana yang berasal dari DAU sebesar Rp. 1.425.851.000,00. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan sumber dana dari OTSUS sebesar Rp. 150.000.000,00. Program kesehatan reproduksi remaja sumber dana berasal dari DAU sebesar Rp.100.000.000,00. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dengan sumber dana yang berasal dari OTSUS sebesar Rp. 472.280.000,00. Program pelayanan kontrasepsi dengan sumber dana yang berasal dari DAU sebesar Rp. 200.000.000,00. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan sumber dana dari DAU sebesar Rp. 790.000.000,00. Sehingga total dana yang digunakan selama tahun 2014 untuk program kegiatan tersebut sebesar Rp. 3.138.131.000,00.

Tahun 2012 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.234.864.000,00. di Tahun 2013 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.591.000.000,00. Sangat terlihat bahwa ditahun di tahun 2013 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 3.138.131.000,00.

2. Dampak Alokasi Anggaran Pemerintah Terhadap Aktivitas Pemberdayaan Perempuan di Kota Jayapura

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu masalah yang belum teratasi sampai sekarang ini, untuk itu dibutuhkan anggaran sebagai penunjang dalam setiap program kegiatan yang dilakukan pemerintah Kota Jayapura dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan.

Dengan adanya anggaran setiap tahunnya beserta program-program kegiatannya, maka diharapkan mampu meningkatkan kualitas perempuan dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan aktivitas terutama pada tiga sektor tertentu yaitu, sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor ekonomi pembangunan atau ekonomi kerakyatan.

Jika alokasi secara jelas digunakan melalui program-program yang berdasarkan kebutuhan masyarakat terkhususnya kelompok perempuan maka ketimpangan seperti angka putus sekolah atau rendahnya kualitas kelulusan terminimalisasi. Dengan demikian diharapkan bahwa anggaran yang dikeluarkan mampu membantu disetiap aktivitas melalui program kegiatan yang dibuat oleh Badan Pemberdayaan Perempuan.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka alokasi anggaran pemerintah terhadap aktivitas pemberdayaan perempuan di Kota Jayapura mempunyai pengaruh terhadap aktivitas pemberdayaan

perempuan yang ada di Kota Jayapura dimana setiap tahunnya anggaran yang di alokasikan ke setiap program kegiatan per tahun mengalami peningkatan.

KESIMPULAN

1. Simpulan

Dari anggaran yang dikelola oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP/KB) dengan maksud dan tujuan untuk penanganan dan keterlibatan perempuan dalam mengambil keputusan kebijakan harus dikelola dengan profesional untuk melakukan program kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, meningkatkan pembinaan kesetaraan gender terkhusus kaum perempuan dalam sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan dapat direalisasikan melalui partisipasi dari komponen perempuan yang ada di Kota Jayapura. Penanganan dan keterlibatan perempuan disetiap program-program kegiatan yang dibuat dan dilaksanakan bertujuan untuk mensejahterakan dan meningkatkan pemahaman khususnya pada kaum perempuan dan juga bisa memberikan sumbangsih besar dengan menunjang program-program kegiatan yang ada.

2. Saran/Rekomendasi

Terhadap sejumlah masalah yang sering di hadapai oleh kaum perempuan dengan beberapa langkah kedepan, perlu adanya kesepahaman dan kesepakatan yang bersifat operasional antara instansi terkait dan pemerintah daerah dalam menetapkan kerangka hukum termasuk penerbitan peraturan tentang criteria, prosedur dan penetapan anggaran yang berbasis gender.

Hal yang juga perlu diperhatikan adalah pemihakan secara sungguh-sungguh terhadap kepentingan rakyat terutama perempuan dalam perumusan dan program kegiatan dalam pembangunan untuk semua aktivitas, agar masalah alokasi anggaran yang berkeadilan gender ini bisa dipahami semua pihak bahwa alokasi anggaran berbasis gender bukan umum tapi diperuntukkan untuk kaum perempuan, perlu juga digalakkan berbasis keadilan gender sebagai instrument dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hubes, Aida Vitaslaya. S,1996, *Gender dan Pembangunan Dalam Liberalisasi Pekerja dan Demokrasi*, CIDES, Jakarta.
- Mikkelsen, Britha, 2003, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia.
- Moore,Helen A,1996, *Sosiologi Wanita*,PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*,PT Refika Aditama,Bandung.
- Budhy Novian, 2010, *Sekilas Tentang Pemberdayaan Perempuan*. (www.kelurahanpondokbambu.com)
- Aileen Mitchell Stewart, 1988, Mulyadi dan Jhony Setyawan 1999:1003. *Pengertian Pemberdayaan*.